KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-97.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASAL PEMOHON

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Pewarganegaraan dan Penyampaian Berita Acara Sumpah Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan status pewarganegaraan 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan pewarganegaraan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Salinan SK 2. SOP Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan 3. SOP Persuratan	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN PEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERKAWINAN KEPADA PERWAKILAN NEGARA ASAL PEMOHON

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu			Keterangan
		Direktur	Kasubdit	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mempelajari dan mendisposisikan kepada Kasubdit perihal Keputusan Menteri terkait Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan				Keputusan Menteri	3 Hari	Disposisi Direktur Tata Negara	
2	Mempelajari dan mendisposisikan kepada verifikator perihal Penyampaian Surat Keputusan Menteri terkait Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Kepada Perwakilan Negara Asal Pemohon				Disposisi Direktur Tata Negara dan Keputusan Menteri	2 Hari	Disposisi Penanggung Jawab	
3	Menyusun konsep surat pengantar Penyampaian Surat Keputusan Menteri terkait Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Kepada Perwakilan Negara Asal Pemohon, dan menyampaikannya kepada Kasubdit				Disposisi Direktur Tata Negara dan Keputusan Menteri	4 Hari	Arahan, Konsep surat Pengantar dan nota dinas kepada Direktur Tata Negara	
4	Memeriksa surat pengantar Penyampaian Keputusan Menteri terkait Pewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan Kepada Perwakilan Negara Asal Pemohon. Jika setuju memberikan paraf dan menyampaikan kepada Direktur Tata Negara			T	Konsep Surat Pengantar Direktur, Nota Dinas	2 Hari	Surat Pengantar Direktur	
5	Mengetahui dan menyetujui draf konsep Surat Salinan SK Pasal 19, Jika setuju memberikan paraf dan menyerahkan kepada Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum		Y		Konsep Surat Pengantar Direktur, Nota Dinas	3 Hari	Surat Pengantar Direktur yang telah di Tanda Tangan	

